

---

### **BAB III**

## **KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

Kebijakan umum pengelolaan keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan kesepakatan bersama antara Pemerintah dan DPRD Provinsi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui sistem terintegrasi yang diwujudkan dalam siklus penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sejak proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan. Mendasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat kepada masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

APBD disusun sesuai kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan mendasarkan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara mendasarkan fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Selain itu APBD juga merupakan salah satu instrumen yang menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah.

Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah terbagi dalam kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

#### **A. PENDAPATAN DAERAH**

Pendapatan Daerah merupakan seluruh hak daerah sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Peningkatan pendapatan daerah dilaksanakan secara terencana sesuai dengan kondisi perekonomian dengan memperhatikan potensi yang ada guna tercapainya peningkatan kemandirian daerah serta mengurangi tingkat ketergantungan terhadap dana perimbangan. Kebijakan pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2018 dalam rangka pencapaian target pendapatan daerah sebagai berikut :

1. Optimalisasi pungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui;
  - a) Peningkatan intensifikasi pungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan lain-lain yang sah.
  - b) Penyempurnaan dasar hukum pemungutan retribusi dan penyesuaian tarif retribusi.
  - c) Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan umum kepada masyarakat/wajib pajak secara akuntabel.

- d) Membangun sistem dan prosedur administrasi pelayanan perpajakan dan retribusi berbasis *online system*.
2. Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan serta profesionalisme aparatur.
3. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak.
4. Meningkatkan sinergitas dengan mitra (Kepolisian RI dan Kanwil Bea Cukai) dalam pemungutan pajak daerah.
5. Optimalisasi pemberdayaan aset daerah.
6. Meningkatkan kualitas manajemen aset daerah; dan
7. Optimalisasi BUMD.

Melalui Kebijakan yang didukung oleh peningkatan kualitas pelayanan publik secara akuntabel dengan penyederhanaan sistem dan prosedur pelayanan diharapkan lebih mendekatkan dan memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan. Disamping itu dilaksanakan optimalisasi pendayagunaan aset daerah dan penajaman potensi riil sumber-sumber pendapatan sehingga mampu memberikan kontribusi PAD.

Pendapatan daerah bersumber dari PAD, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Tahun Anggaran 2018 ditargetkan sejumlah Rp24.815.550.076.000,00 terealisasi Rp24.701.017.599.994,00 atau 99,54%, mengalami kenaikan sejumlah Rp997.842.968.487,00 atau 4,21% dibandingkan Tahun Anggaran 2017.

**Tabel 3.1**  
**TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH**  
**TA. 2018 DAN TA. 2017**

NO	URAIAN	TARGET TA. 2018	REALISASI		
			TA. 2018	%	TA. 2017 (Audited)
1.	Pendapatan Asli Daerah	13.396.772.661.000,00	13.711.732.768.298,00	102,35	12.547.513.389.400,00
2.	Dana Perimbangan	11.363.269.415.000,00	10.933.776.831.696,00	96,22	11.067.786.491.093,00
3.	Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah	55.508.000.000,00	55.508.000.000,00	100,00	87.874.751.014,00
<b>Jumlah</b>		<b>24.815.550.076.000,00</b>	<b>24.701.017.599.994,00</b>	<b>99,54</b>	<b>23.703.174.631.507,00</b>

Berdasarkan tabel di atas realisasi pendapatan daerah dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Pendapatan Asli Daerah

PAD Tahun Anggaran 2018 ditargetkan sejumlah Rp13.396.772.661.000,00 terealisasi Rp13.711.732.768.298,00 atau 102,35%. Realisasi PAD berkontribusi terhadap Pendapatan Daerah sebesar 55,51%, mengalami kenaikan sejumlah Rp1.164.219.378.898,00 atau 9,28% dari Tahun 2017. Adapun rincian realisasi PAD sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

**Tabel 3.2**  
**TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH**  
**TA. 2018 DAN TA. 2017**

NO	URAIAN	TARGET TA. 2018	REALISASI		
			TA. 2018	%	TA. 2017 ( <i>Audited</i> )
1	Pajak Daerah	11.087.697.617.000,00	11.507.119.643.262,00	103,78	10.572.698.332.610,00
2	Retribusi Daerah	108.979.571.000,00	104.957.567.382,00	96,31	107.372.397.279,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	459.626.558.000,00	459.626.767.964,00	100,00	371.072.481.501,00
4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1.740.468.915.000,00	1.640.028.789.690,00	94,23	1.496.370.178.010,00
<b>Jumlah</b>		<b>13.396.772.661.000,00</b>	<b>13.711.732.768.298,00</b>	<b>102,35</b>	<b>12.547.513.389.400,00</b>

- a. **Pajak Daerah**, ditargetkan sejumlah Rp11.087.697.617.000,00 terealisasi sejumlah Rp11.507.119.643.262,00 atau 103,78%, dibandingkan tahun 2017 terdapat kenaikan sejumlah Rp934.421.310.652,00 atau 8,84%.

Pajak Daerah terdiri atas :

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor, ditargetkan sejumlah Rp4.064.855.000.000,00 terealisasi Rp4.248.132.806.425,00 atau 104,51%, mengalami kenaikan sejumlah Rp402.019.864.925,00 atau 10,45% apabila dibandingkan Tahun Anggaran 2017.
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, ditargetkan sejumlah Rp3.145.682.000.000,00 terealisasi Rp3.423.363.674.275,00 atau 108,83%, mengalami kenaikan sejumlah Rp392.144.500.275,00 atau 12,94% dibandingkan Tahun Anggaran 2017.
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditargetkan Rp1.765.500.000.000,00 terealisasi Rp1.846.840.170.007,00 atau 104,61%, mengalami kenaikan sejumlah Rp193.290.467.197,00 atau 11,69% dibandingkan Tahun Anggaran 2017.
- 4) Pajak Air Permukaan, ditargetkan sejumlah Rp12.200.000.000,00 terealisasi Rp12.983.347.703,00 atau 106,42%, mengalami kenaikan sejumlah Rp1.560.575.504,00 atau 13,66% dibandingkan Tahun Anggaran 2017.
- 5) Pajak Rokok, ditargetkan sejumlah Rp2.099.460.617.000,00 terealisasi Rp1.975.799.644.852,00 atau 94,11%, mengalami penurunan sejumlah Rp54.594.097.249,00 atau 2,69% dibandingkan Tahun Anggaran 2017. Penurunan realisasi dikarenakan adanya kontribusi daerah untuk Jaminan Kesehatan Masyarakat berupa pemotongan sebesar 37,5% dari pajak rokok yang diterima daerah untuk BPJS sebesar Rp. 213.417.268.719,00.

**b. Retribusi Daerah**, ditargetkan sejumlah Rp108.979.571.000,00 terealisasi sejumlah Rp104.957.567.382,00 atau 96,31%, dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 terdapat penurunan sejumlah Rp2.414.829.897,00 atau 2,25%. Retribusi Daerah terdiri atas :

- 1) Retribusi Jasa Umum, ditargetkan sejumlah Rp27.640.031.000,00 terealisasi Rp24.583.604.212,00 atau 88,94%, mengalami penurunan sejumlah Rp3.592.971.238,00 atau 12,75% dibandingkan Tahun 2017.  
Hal ini disebabkan karena tidak tercapainya Retribusi Pelayanan Kesehatan yang ditargetkan Rp26.515.081.000,00 terealisasi Rp23.163.159.212,00 atau 87,36% dengan penjelasan sebagai berikut :
  - a. Turunnya rujukan BPJS online karena belum seluruh balai pengobatan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki dokter spesialis sedangkan system mempersyaratkan adanya dokter spesialis pada balai pengobatan; dan
  - b. Keterlambatan pembayaran dari BPJS, beberapa UPT baru terbayarkan sampai Bulan Agustus 2018.
- 2) Retribusi Jasa Usaha, ditargetkan sejumlah Rp77.819.990.000,00 terealisasi Rp75.730.957.570,00 atau 97,32%, mengalami kenaikan sejumlah Rp3.290.289.941,00 atau 4,54% dibandingkan Tahun 2017. Realisasi Retribusi Jasa Usaha tidak tercapai dikarenakan Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah yang ditargetkan Rp21.826.941.000,00 terealisasi Rp18.146.102.378,00 atau 83,14% dengan penjelasan antara lain sebagai berikut :
  - a. Belum adanya finalisasi dan payung hukum pasti terkait ijin nelayan cantrang berlayar dari pemerintah pusat.
  - b. Penurunan penerimaan pendapatan wisma DPRD karena munculnya persaingan dari hotel baru yang memiliki fasilitas lebih lengkap dengan harga murah serta lokasi strategis.
  - c. Penurunan pendapatan dari sewa ruang pertemuan di gedung wanita dan gedung PKK ungaran karena sedang dilakukan proses renovasi.
  - d. Penurunan penerimaan pendapatan dari penjualan hasil perkebunan karena anomali cuaca dan serangan virus tanaman serta kurangnya peremajaan; adanya kebun dinas yang digunakan untuk kegiatan APBN penanaman tebu bagi masyarakat; dan revitalisasi kebun dinas sebagai kebun sumber benih yang akan menghasilkan produksi 2 sampai dengan 4 tahun kedepan.
  - e. *Loss potential* atas pendapatan yang bersumber dari reklame di median jalan besar nasional yang menjadi kewenangan pemerintah pusat berdasarkan Permen PU 20/2011; dan
  - f. Penerimaan dari retribusi Terminal belum bisa dilakukan dikarenakan belum adanya regulasi yang mengatur tentang pemungutan pelayanan masuk terminal untuk bus.
- 3) Retribusi Perijinan Tertentu, ditargetkan sejumlah Rp3.519.550.000,00 realisasinya mencapai Rp4.643.005.600,00 atau 131,92%.

c. **Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan**, berupa dividen/bagian laba perusahaan yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), ditargetkan sejumlah Rp459.626.558.000,00 terealisasi Rp459.626.767.964,00 atau 100%, mengalami kenaikan sejumlah Rp88.554.286.463,00 atau 23,86% dari realisasi Tahun 2017 terdiri dari :

- 1) Sebanyak 8 BUMD ditargetkan sejumlah Rp449.348.583.000,00 terealisasi Rp449.348.791.986,00 atau 100%. Realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan Tahun Anggaran 2017 sejumlah Rp359.802.375.764,00 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

**Tabel 3.3**

**TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN YANG BERSUMBER DARI BUMD  
TA. 2018 DAN TA. 2017**

NO	URAIAN	TARGET TA 2018	Realisasi		
			TA 2018	%	TA 2017 (Audited)
1	PD. CMJT	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	100	6.224.814.706,00
2	PT. Bank Jateng	341.139.512.000,00	341.139.512.009,00	100	265.246.817.254,00
3	BPR – BKK	67.219.079.000,00	67.219.285.749,00	100	57.031.441.365,00
4	PDAB Tirta Utama	3.315.530.000,00	3.315.530.402,00	100	3.058.025.665,00
5	PT. PRPP	-	-	-	-
6	PT. SPJT	20.903.469.000,00	20.903.469.671,00	100	20.886.360.443,00
7	PT. SPHC	7.225.040.000,00	7.225.040.483,00	100	5.750.789.290,00
8	PT. JAMKRIDA	3.045.953.000,00	3.045.953.672,00	100	1.604.127.041,00
<b>Jumlah</b>		<b>449.348.583.000,00</b>	<b>449.348.791.986,00</b>	<b>100</b>	<b>359.802.375.764,00</b>

PT PRPP diharapkan baru akan memberikan dividen pada tahun 2019, karena masih menanggung kerugian kumulatif sampai tahun 2018.

- 2) Sebanyak 1 BUMN (PT KIW) dan 1 Pihak Ketiga (PT Askrida) ditargetkan sejumlah Rp10.277.975.000,00 terealisasi Rp10.277.975.978,00 atau 100%. Realisasi tersebut lebih rendah dibandingkan Tahun Anggaran 2017 sejumlah Rp11.270.105.737,00 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

**Tabel 3.4**

**TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN YANG BERSUMBER DARI  
BUMN DAN PIHAK KETIGA TA. 2018 DAN TA. 2017**

NO	URAIAN	TARGET TA. 2018	REALISASI		
			TA. 2018	%	TA. 2017 (Audited)
1	PT. KIW	3.917.051.000,00	3.917.051.730,00	100	4.295.992.206,00
2	PT. ASKRIDA	6.360.924.000,00	6.360.924.248,00	100	6.974.113.531,00
<b>Jumlah</b>		<b>10.277.975.000,00</b>	<b>10.277.975.978,00</b>	<b>100</b>	<b>11.270.105.737,00</b>

d. **Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah**, ditargetkan sejumlah Rp 1.740.468.915.000,00 terealisasi Rp 1.640.028.789.690,00 atau 94,23%, mengalami kenaikan sejumlah Rp 143.658.611.680,00 atau 9,60% dari realisasi Tahun 2017. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah meliputi:

- 1) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dari 7 BLUD ditargetkan sejumlah Rp 1.352.600.000.000,00 terealisasi Rp 1.209.119.292.311,00 atau 89,39% dikarenakan belum terbayarnya piutang BPJS Oktober sampai Desember 2018.
- 2) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah selain BLUD ditargetkan sejumlah Rp 387.868.915.000,00 terealisasi mencapai Rp 430.909.497.379,00 atau 111,10%.

## 2. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan TA. 2018 ditargetkan sejumlah Rp11.363.269.415.000,00 terealisasi Rp10.933.776.831.696,00 atau 96,22%. Kontribusi terhadap realisasi pendapatan daerah sebesar 44,26%. Apabila dibandingkan dengan tahun 2017 terdapat penurunan sejumlah Rp134.009.659.397,00 atau 1,21%. Adapun rincian realisasi Dana Perimbangan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

**Tabel 3.5**  
**TARGET DAN REALISASI DANA PERIMBANGAN**  
**TA. 2018 DAN TA. 2017**

NO	URAIAN	TARGET TA.2018	REALISASI		
			TA. 2018	%	TA. 2017 (Audited)
1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	954.366.898.000,00	769.449.921.024,00	80,62	848.309.911.393,00
2	Dana Alokasi Umum	3.652.586.431.000,00	3.652.586.431.000,00	100,00	3.652.586.431.000,00
3	Dana Alokasi Khusus	6.756.316.086.000,00	6.511.740.479.672,00	96,38	6.566.890.148.700,00
<b>Jumlah</b>		<b>11.363.269.415.000,00</b>	<b>10.933.776.831.696,00</b>	<b>96,22</b>	<b>11.067.786.491.093,00</b>

Tidak tercapainya target dana perimbangan dikarenakan :

- a. Tidak tercapainya Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dikarenakan kebijakan keuangan nasional; dan
- b. Tidak tercapainya Dana Alokasi Khusus dikarenakan gagal lelang dan tidak cukup waktu untuk dilakukan lelang ulang; kegiatan tidak selesai dilaksanakan (*wanprestasi*) serta lokasi kegiatan yang status lahannya merupakan milik Kabupaten/Kota.

## 3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2018 ditargetkan sejumlah Rp 55.508.000.000,00 terealisasi Rp 55.508.000.000,00 atau 100%. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memberikan kontribusi terhadap realisasi

Pendapatan Daerah sebesar 0,22%. Adapun rincian realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

**Tabel 3.6**  
**TARGET DAN REALISASI LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**  
**TA. 2018 DAN TA. 2017**

No	URAIAN	TARGET TA.2018	REALISASI		
			TA. 2018	%	TA.2017 (Audited)
1	Pendapatan Hibah	22.008.000.000,00	22.008.000.000,00	100	36.938.923.844,00
2	Dana Bagi Hasil Pajak dr Prov & Pemda Lainnya	-	-	-	737.884.170,00
3	Dana Insentif	33.500.000.000,00	33.500.000.000,00	100	50.197.943.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>55.508.000.000,00</b>	<b>55.508.000.000,00</b>	<b>100</b>	<b>87.874.751.014,00</b>

### Permasalahan

Adapun permasalahan yang dihadapi dan solusi dalam pengelolaan pendapatan antara lain sebagai berikut :

1. Perhitungan proyeksi pendapatan masih mendasarkan data series penerimaan tahun sebelumnya dan belum sepenuhnya menggunakan analisis perhitungan proyeksi pendapatan;
2. Pelayanan dan pengelolaan pajak yang belum optimal karena terbatasnya sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung;
3. Masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu;
4. Kecenderungan berkurangnya prosentase penguasaan saham pemerintah Provinsi pada beberapa BUMD sehingga berpotensi terjadi delusi dan tidak lagi menjadi pemegang saham pengendali;
5. Belum optimalnya pengembangan sumber sumber pendapatan lain dan masih bergantungnya pada penerimaan pajak daerah;
6. Belum optimalnya pengamanan fisik dan administrasi aset pemerintah daerah sehingga berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan

### Solusi

1. Menginventarisir potensi sumber-sumber pendapatan secara cermat dan teliti, mengakomodasi variabel-variabel ekonomi makro dan variabel lain yang memiliki korelasi terhadap masing-masing potensi pendapatan, sehingga perhitungan proyeksi pendapatan sesuai dengan potensi riil dan kondisi perekonomian saat ini.
2. Pengembangan model pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui pembayaran elektronik berbasis android.
3. Menggali potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor melalui kegiatan razia gabungan, meningkatkan kegiatan penagihan tunggakan pajak secara *door to door*, memberikan doorprize kepada wajib pajak yang taat pajak melalui gebyar hadiah samsat 2018, melakukan penagihan melalui telepon kepada wajib pajak yang menunggak; Berkoordinasi dengan Asosiasi dan dealer untuk melakukan strategi

promosi dan inovasi penjualan kendaraan bermotor guna menarik konsumen sehingga dapat menjaga angka penjualan kendaraan bermotor.

4. Mengupayakan tambahan penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah agar dapat menunjang rencana bisnis BUMD dengan harapan dapat meningkatkan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah.
5. Peningkatan kinerja BUMD, revitalisasi dan optimalisasi pendayagunaan aset-aset milik Pemerintah serta menggali potensi yang mendukung penerimaan retribusi daerah.
6. Inventarisasi ulang atas aset tetap secara komprehensif dengan melibatkan tim appraisal independen guna pengamanan dan perolehan penghitungan nilai ekonomis aset, koordinasi lintas SKPD dalam upaya pengamanan dan pemanfaatan aset mangkrak, mempromosikan aset melalui spanduk, media massa dan Sistem Informasi Komprehensif Bidang Aset Daerah (Sikom-BAD).

## **B. BELANJA DAERAH**

Peningkatan belanja daerah diprioritaskan pada kepentingan publik terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat melalui program/kegiatan strategis yang memiliki kontribusi terhadap capaian pembangunan jangka menengah daerah melalui sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah. Kebijakan belanja daerah dilaksanakan melalui pendekatan anggaran berbasis kinerja dengan memperhatikan prioritas dan program strategis pembangunan secara selektif, akuntabel dan transparan. Mendasarkan hal tersebut, maka belanja daerah yang dialokasikan :

1. Belanja Tidak Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja Tidak Langsung diarahkan untuk :
  - a) Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah serta memiliki skala pelayanan nasional dan regional;
  - b) Meningkatkan keserasian pembangunan antar wilayah dan daerah Kabupaten/Kota.
2. Belanja Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program prioritas daerah dan urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan, pemenuhan pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat serta mendorong percepatan pencapaian target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Belanja Daerah dianggarkan sejumlah Rp26.186.587.329.000,00 terealisasi Rp24.660.589.888.921,00 atau 94,17% Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, maka terdapat kenaikan sejumlah Rp1.775.876.870.167,00 atau 7,76% Tahun 2017 sejumlah Rp22.884.713.018.754,00.

Komponen Belanja Daerah terdiri dari Belanja Tidak Langsung dianggarkan sejumlah Rp19.051.649.219.000,00 terealisasi Rp18.220.072.819.404,00 atau 95,64%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sejumlah Rp17.583.623.562.444,00, maka terdapat kenaikan sejumlah Rp636.449.256.960,00 atau 3,62%.



Kenaikan belanja tidak langsung tersebut selain digunakan untuk kebutuhan belanja pegawai juga dialokasikan untuk upaya peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat miskin melalui bantuan langsung kepada masyarakat, belanja modal atau pembangunan yang diimplementasikan dalam bantuan keuangan kepada pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah desa, pemberdayaan kelompok masyarakat dengan memberikan bantuan hibah, belanja tidak terduga serta belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota. Belanja Tidak Langsung meliputi:

1. Belanja Pegawai dianggarkan sejumlah Rp5.965.782.169.000,00 terealisasi Rp5.766.878.413.447,00 atau 96,67%. Apabila dibandingkan tahun 2017, terdapat kenaikan sejumlah Rp140.031.188.143,00 atau 2,49%.
2. Belanja Hibah dianggarkan sejumlah Rp5.667.713.173.000,00 terealisasi Rp5.316.409.565.402,00 atau 93,80%. Apabila dibandingkan tahun 2017, terdapat kenaikan sejumlah Rp363.026.283.651,00 atau 7,33%.
3. Belanja Bantuan Sosial dianggarkan sejumlah Rp45.211.750.000,00 terealisasi Rp42.336.750.000,00 atau 93,64%. Apabila dibandingkan tahun 2017, terdapat penurunan sejumlah Rp195.931.470.000,00 atau 82,23%.
4. Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota dianggarkan sejumlah Rp5.101.505.174.000,00 terealisasi Rp4.971.230.606.896,00 atau 97,45%. Apabila dibandingkan tahun 2017, terdapat kenaikan sejumlah Rp158.907.355.255,00 atau 3,30%.
5. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dianggarkan sejumlah Rp2.253.436.953.000,00 terealisasi Rp2.110.119.983.659,00 atau 93,64%. Apabila dibandingkan tahun 2017, terdapat kenaikan sejumlah Rp158.449.349.911,00 atau 8,12%.
6. Belanja Tidak Terduga dianggarkan sejumlah Rp18.000.000.000,00 terealisasi Rp13.097.500.000,00 atau 72,76%. Apabila dibandingkan tahun 2017, terdapat kenaikan sejumlah Rp11.966.550.000,00 atau 1.058,10%

Belanja Langsung dianggarkan sejumlah Rp7.134.938.110.000,00 terealisasi Rp6.440.517.069.517,00 atau 90,27%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sejumlah Rp5.301.089.456.310,00, maka terdapat kenaikan sejumlah Rp1.139.427.613.207,00 atau 21,49% dari realisasi Tahun 2017.

Kenaikan belanja langsung selain digunakan sebagai belanja operasional SKPD guna peningkatan kelancaran pelayanan kepada masyarakat juga dialokasikan untuk pelaksanaan program yang berstandar pelayanan minimal dan operasional; peningkatan pelayanan publik; mempertahankan alokasi belanja sebesar 20% untuk fungsi pendidikan; serta membiayai program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan Jawa Tengah Tahun 2018. Belanja Langsung meliputi:

1. Belanja Pegawai dianggarkan sejumlah Rp753.053.752.000,00 terealisasi Rp712.687.327.123,00 atau 94,64%. Apabila dibandingkan tahun 2017, terdapat kenaikan sejumlah Rp247.456.801.910,00 atau 53,19%.
2. Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sejumlah Rp4.481.751.474.000,00 terealisasi Rp4.048.769.333.468,00 atau 90,34%. Apabila dibandingkan tahun 2017, terdapat kenaikan sejumlah Rp667.508.486.835,00 atau 19,74%.

3. Belanja Modal dianggarkan sejumlah Rp1.900.132.884.000,00 terealisasi Rp1.679.060.408.926,00 atau 88,37%. Apabila dibandingkan tahun 2017, terdapat kenaikan sejumlah Rp224.462.324.462,00 atau 15,43%.

Rincian lebih lanjut anggaran dan realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Tabel berikut:

**Tabel 3.7**  
**ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA DAERAH**  
**TA. 2018 DAN TA. 2017**

NO	URAIAN	TARGET TA. 2018	REALISASI		
			TA. 2018	%	TA. 2017 (Audited)
<b>1.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>				
	a. Belanja Pegawai	5.965.782.169.000,00	5.766.878.413.447,00	96,67	5.626.847.225.304,00
	b. Belanja Hibah	5.667.713.173.000,00	5.316.409.565.402,00	93,80	4.953.383.281.751,00
	c. Belanja Bantuan Sosial	45.211.750.000,00	42.336.750.000,00	93,64	238.268.220.000,00
	d. Belanja Bagi Hasil Kepada Kab/Kota	5.101.505.174.000,00	4.971.230.606.896,00	97,45	1.951.670.633.748,00
	e. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kab/Kota dan Pemerintahan Desa	2.253.436.953.000,00	2.110.119.983.659,00	93,64	4.812.323.251.641,00
	f. Belanja Tidak Terduga	18.000.000.000,00	13.097.500.000,00	72,76	195.950.000,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>19.051.649.219.000,00</b>	<b>18.220.072.819.404,00</b>	<b>95,64</b>	<b>17.583.623.562.444,00</b>
<b>2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				
	a. Belanja Pegawai	753.053.752.000,00	712.687.327.123,00	94,64	465.230.525.213,00
	b. Belanja Barang dan Jasa	4.481.751.474.000,00	4.048.769.333.468,00	90,34	3.381.260.846.633,00
	c. Belanja Modal	1.900.132.884.000,00	1.679.060.408.926,00	88,37	1.454.598.084.464,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>7.134.938.110.000,00</b>	<b>6.440.517.069.517,00</b>	<b>90,27</b>	<b>5.301.089.456.310,00</b>
	<b>TOTAL BELANJA DAERAH</b>	<b>26.186.587.329.000,00</b>	<b>24.660.589.888.921,00</b>	<b>94,17</b>	<b>22.884.713.018.754,00</b>

Adapun permasalahan yang dihadapi dan solusi dalam pengelolaan belanja antara lain sebagai berikut:

#### Permasalahan

1. Belum optimalnya penggunaan *Cash Management System* (CMS) oleh pengelola keuangan SKPD/UPT/Balai/Satker karena keterbatasan pemahaman SDM pengelola keuangan dan ketersediaan sarana prasarana yang belum menjangkau daerah pelosok.
2. Adanya kegiatan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota yang mengalami keterlambatan dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangannya;
3. Masih adanya unit kerja pasca pemberlakuan SOTK baru di Tahun 2018 yang belum sepenuhnya terakomodir kebutuhan anggarannya;
4. Kurangnya pemahaman pengelolaan keuangan dan mekanisme pertanggungjawaban keuangan sekolah serta barang milik daerah di Satuan Pendidikan Menengah (SMA/SMK) serta Satuan Pendidikan Khusus (SLB).

## Solusi

1. Menyelenggarakan bimbingan teknis kepada para pengelola keuangan di tingkat SKPD/UPT/Balai, melakukan pengembangan dan sinkronisasi antara aplikasi pengelolaan keuangan daerah dengan aplikasi *Cash Management System* serta aplikasi pajak serta mendorong dan menghimbau Bank Jateng untuk meningkatkan pelayanan sampai dengan pelosok untuk menjangkau UPT/Balai/Satker.
2. Melakukan pengendalian, monitoring dan akselerasi serta asistensi pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan bagi kabupaten/kota penerima Bantuan Keuangan;
3. Mengoptimalkan pembiayaan dari SKPD induk.
4. Menyediakan sistem pengelolaan keuangan sekolah dan barang milik daerah, menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan sekolah serta melakukan bimbingan teknis kepada bendahara dan pengurus barang sekolah tentang pentingnya pengelolaan keuangan dan barang milik sekolah.

## C. PEMBIAYAAN DAERAH

Dalam struktur APBD, selain komponen Pendapatan dan Belanja Daerah, terdapat juga Pembiayaan Daerah. Kebijakan umum pembiayaan adalah meningkatkan manajemen pembiayaan daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, efektifitas dan profitabilitas sumber-sumber pembiayaan. Kebijakan umum Pembiayaan Daerah terdiri dari Kebijakan dan Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah serta Kebijakan dan Rencana Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

### 1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan pembiayaan pada Tahun Anggaran 2018 diarahkan untuk menutup defisit anggaran yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2017. Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sejumlah Rp1.511.037.253.000,00 terealisasi sejumlah Rp1.511.249.666.433,00 atau 100,01%. Realisasi penerimaan pembiayaan daerah mengalami kenaikan sejumlah Rp864.674.026.678,00 atau 133,73% apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2017 sejumlah Rp646.575.639.755,00.

### 2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan merupakan pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan pada Tahun Anggaran 2018 diarahkan untuk penyertaan modal dan pembentukan dana cadangan dalam rangka Pilkada Gubernur. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp140.000.000.000,00 terealisasi Rp140.000.000.000,00 atau 100%. Realisasi pengeluaran pembiayaan daerah mengalami penurunan Rp164.000.000.000,00 atau 53,95% apabila dibandingkan dengan realisasi pengeluaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2017 sejumlah Rp304.000.000.000,00. Rincian lebih lanjut anggaran dan realisasi pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.8**  
**ANGGARAN DAN REALISASI PEMBIAYAAN DAERAH**  
**TA. 2018 DAN TA. 2017**

NO	URAIAN	TARGET TA 2018	REALISASI		
			TA 2018	%	TA 2017 (Audited)
1	Penerimaan Pembiayaan				
	a. Penggunaan SiLPA	1.161.037.253.000,00	1.161.037.252.508,00	100,00	646.122.875.159,00
	b. Pencairan Dana Cadangan	350.000.000.000,00	350.000.000.000,00	100,00	-
	c. Penerimaan Dana Talangan Pengadaan Pangan	-	-		2.727.273,00
	d. Penerimaan Pinjaman Pokok Dana Bergulir	-	212.413.925,00		450.037.323,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.511.037.253.000,00</b>	<b>1.511.249.666.433,00</b>	<b>100,01</b>	<b>646.575.639.755,00</b>
2	Pengeluaran Pembiayaan				
	a. Pembentukan Dana Cadangan	-	-		-
	b. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	140.000.000.000,00	140.000.000.000,00	100,00	304.000.000.000,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>140.000.000.000,00</b>	<b>140.000.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>304.000.000.000,00</b>
	<b>TOTAL PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>1.371.037.253.000,00</b>	<b>1.371.249.666.433,00</b>	<b>100,02</b>	<b>342.575.639.755,00</b>